



PUTUSAN
NOMOR 49/PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TRI YULIANTO
2. Tempat tanggal lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 50 Th/ 23 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simo Magerejo RT.02 RW.01 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. Surveyor Indonesia (Ex Kepala Cabang PT.Surveyor Indonesia Makassar);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
11. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
12. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu MUNAWIR ABDUL KAMAL, S.H.,M.H., dan MUH. ALWI HIDAYAT,S.H.,M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum MSATA Law Office, beralamat di Jl. Pallantikang No. 8 Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prop. Sulsel., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 168/Pid.Tpk./2024/KB tanggal 25 Maret 2024 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair:

Perbuatan Terdakwa Tri Yulianto, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa Tri Yulianto, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Halaman 2 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 49/PID.TPK/2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Yulianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tri Yulianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tri Yulianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan pidana denda **Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 888.964.703,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork :

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
 - 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
 - 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
 - 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.
2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)

Halaman 4 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.

4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019

2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)

2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)

3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)

2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)

2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).



- 2) Permohonan Dropping November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Dropping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.

Halaman 6 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.

Halaman 7 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka

Halaman 8 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil
- 49) List Penyewaan
- 50) List Peyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021



- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 003/ S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02



A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)



B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020

Halaman 12 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020



- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020

Halaman 14 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/2020 Tanggal 30 Juni 2020
 - i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/CS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
 - k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

Halaman 15 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021
- r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/CSA/III/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil



B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
- PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS.SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019



- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Kontrak Personil Proyek
12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Aanggaran (P-DKA-01) dari DKA
 - a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019
 - b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/ 2019 Tanggal 15 Mei 2019
 - c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei 2019
 - d. Permohonan Droning Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI.TY.2019 Permohonan Droning 25 Juni 2019
 - e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
 - f. Permohonan Droning Juli 2019 No. MEM – 012 . SIMAK -VII. TY. 2019 Permohonan Droning 23 Juli 2019
 - g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019
 - h. Permohonan Droning Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
 - i. Permohonan Droning Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019

Halaman 18 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Permohonan Dropped September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201 Permohonan Dropped 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropped 23 September 2019
- l. Permohonan Dropped Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Dropped 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropped 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropped Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropped 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropped 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropped Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropped 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropped 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)

Halaman 19 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:
- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
 - 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
 - 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
 - 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.

Halaman 20 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening :5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari,Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari,Februari, Maret 2020.

Halaman 21 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, maret 2022.
 - 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening : 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
 - 31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
 - 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
 - 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
 - 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
 - 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
 15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
 16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
 17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
 18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
 19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.



20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

Halaman 23 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.
36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.
37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.
39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.
40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.
41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.
42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.
43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.
44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager



Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.
46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/SIMAK/TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.
48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.
(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama PekerjaanPenyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.

Halaman 25 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-

(Disita dari M. Rijal)

65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal



15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.



73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Rebornselama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta denganperiode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020



sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian

Halaman 29 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 202 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000,-
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.
- (Disita dari M. Ridho Umbaran)**
97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.
98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.
99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020
100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).
101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.
102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.



103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.

104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

**Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.
(Disita dari Agus Ibrahim)**

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.
(Disita dari Dian Vita Juliastanti)**

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.
(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)**

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.
(Disita dari M.Rijal)**

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.
(Disita dari Pedi Fadillah)**

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.
(Disita dari Jasi Ekarini)**

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.
Dirampas oleh negara Cq. PT. Surveyor Indonesia dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tri Yulianto.



(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening : 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.
113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.
114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.
115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.
117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening : 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

**Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.
(Disita dari indra Gumilar Prasetya)**

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Yulianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan:Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tri Yulianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara Bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.888.964.703,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana secara proporsional dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork:

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

Halaman 34 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)



B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL
Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek



- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Dropping November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.



- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Draping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.

Halaman 38 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.

Halaman 39 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil

Halaman 40 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) List Penyewaan
- 50) List Peyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)

Halaman 41 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)

Halaman 42 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019
5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)



D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)



- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020



- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020



- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

Halaman 47 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30

Halaman 48 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020
- i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/ CS/ XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021
- r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/ CSA/ III/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021

Halaman 49 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

Halaman 50 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04) -PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK- III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019
- 3) Form FP-Proyek 01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019

Halaman 51 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP. 02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019
- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA
 - a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019
 - b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019



- c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei 2019
- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI. TY. 2019 Permohonan Dropping 25 Juni 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII.TY.2019 Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019
- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201 Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 September 2019
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropping 12 Desember 2019

Halaman 53 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019



- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
- j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 25 September 2020
- k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG

Halaman 55 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.

Halaman 56 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening :5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening :1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Padi Fadillah Nomor Rekening :039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Padi Fadillah Nomor Rekening :700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.

Halaman 57 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.



23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

Halaman 59 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.
37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.
39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.
40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.
41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.
42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.
43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.
44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

Halaman 60 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.
46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/SIMAK/TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.
48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.\
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama PekerjaanPenyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.



54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/ SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/ SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.



66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah



pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.



78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah



pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan priode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000,-
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)



97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.
98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.
99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020
100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).
101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengelolaan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.
102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.
103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.
104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

**Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.
(Disita dari Agus Ibrahim)**

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.**

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.**

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)



107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Pedi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.

Dirampas oleh negara Cq. PT. Surveyor Indonesia dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tri Yulianto.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening: 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.



113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.
114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.
115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, maret tahun 2022.
117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening: 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

(Disita dari indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ifachrul Madin.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor



40/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2024 ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2024 dihadiri



oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 2 Agustus 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 5 Agustus 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dinyatakan telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 29 Juli 2024 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa TRI YULIANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan



semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan dimana perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan menyalah gunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum ,terkecuali mengenai straffmaat dan pidana pengganti kerugian keuangan negara.Pertimbangan yudex factie tersebut dilandaskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan yuridis

- -bahwa tidak terbuktinya eks.Pasal.2(1) dalam Dakwaan Primair bukan hanya terfokus pada hubungan causalitei antara perbuatan Terdakwa dengan delik formil semata” ; akan tetapi juga unsur sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri,orang lain,atau korporasi dimana tidak secara faktual dapat dibuktikan sebagai modus perbuatan Terdakwa dengan terdakwa lainnya; melainkan terbuktinya Terdakwa selaku Kepala Cabang PT.Surveyor Indonesia Cabang Makassar (PT.Persero) telah menyalah gunakan kewenangannya dalam bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan core business yang berakibat kerugian keuangan negara
- -bahwa unsur “setiap orang” dalam eks Pasal.3 tidak bersifat sama dan sebangun dibandingkan Eks.Pasal 2 ayat 1 mengingat unsur tersebut haruslah dikaitkan dengan adanya kewenangan yang bersifat publik (gezaagte) hal mana disandang oleh Terdakwa selaku kepala Cabang Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Persero in casu PT.Surveyor Indonesia Cabang Makassar sehingga kualitas atau legal standing terdakwa lebih lebih melingkupi dakwaan subsidair;
- Perbuatan Terdakwa secara formil dengan mengajukan RAB bukan perbuatan melawan hukum,akan tetapi penggunaan dana yang diterima dari PT.Surveyor Indonesia Pusat untuk tujuan lainnya guna pembiayaan masalah tanah dalam suatu perkara dengan skema perjanjian PT.SIMAK dengan PT Basista

Halaman 73 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



Teamwork Tahun 2019 yang merupakan penyalahgunaan wewenang;

- Dari Sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia di Makassar Tahun 2018-2021 ataupun kekayaan yang merugikan keuangan negara Rp.888.964.703,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah) termasuk kategori ringan, dengan derajat kesalahan sedang serta dampaknya bersifat lokal;

2. Alasan sosiologis;

- Perbuatan terdakwa terkait dengan perbuatan fiktif dan manipulatif pada pendanaan yang tidak termasuk pada usaha utama perusahaan;

3. Alasan filosofis;

- Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku yang menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa hal mana telah tercermin pada putusan in litis;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding Penasihat Hukum/Terdakwa tertanggal.26-AGUSTUS-2024 sebagai berikut :

1. Perihal keberatan pertama dan kedua mengenai status ahli dari akuntan publik penilaian pembuktian dikaitkan dengan alat bukti lain tidak menjadi kewajiban yuridis guna menilai soal status keahlian terkait dalam menghitung kerugian keuangan negara, karenanya keberatan tentang hal tersebut harus dikesampingkan ;
2. Keberatan ketiga tentang status PT. Surveyor Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Biro Klasifikasi tidak mendapat fasilitas negara karenanya kerugian yang ditimbulkan bukan merupakan kerugian keuangan negara irrelevant untuk



dipertimbangkan mengingat eksistensi PT.Surveyor secara faktual merupakan bukan bentuk badan usaha hasil usaha bersama antara PT Biro Klasifikasi dengan perusahaan swasta lainnya.Mutatis mutandis dalil keberatan terkait status dan kerugian harus dikesampingkan;

3. Mengenai keberatan ke empat, lima, enam, dan tujuh secara substansial bersifat pengulangan akan tetapi secara hukum tidak dapat meruntuhkan konstruksi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, tentang status hukum dalam peradilan atas diri terdakwa (persona standio in yudicio) sebagai pelaku penyalah gunaan wewenang, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 12 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasssar berpendapat secara substansial kontra Memori Banding aquo tidak sependapat terhadap alasan yuridis dan fakta tentang pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa in casu.Terhadap Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasssar berpendapat bahwa konstruksi dakwaan yang terbukti serta straffmaat (pemidanaan) telah dipertimbangkan seluruhnya oleh yudex facti tingkat banding,karena hal-hal sepanjang kontra Memori Banding selebihnya tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks, tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa yang dinyatakan sebagai "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ";

Menimbang bahwa sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan demikian amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2024 2023 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks kualifikasi tindak pidananya kurang tepat dan perlu diubah, sehingga amar



selengkapnya menjadi terbaca sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual maupun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 29 Juli 2024 perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai

Halaman 76 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TRI YULIANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI YULIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
5. Menghukum terdakwa TRI YULIANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.888.964.703,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana secara proporsional dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa TRI YULIANTO dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa TRI YULIANTO tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork:

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

Halaman 77 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)



B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL
Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek



- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Dropping November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/ TY/ 2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.

Halaman 80 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Draping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.

Halaman 81 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.

Halaman 82 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil

Halaman 83 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) List Penyewaan
- 50) List Peyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)



- a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)

Halaman 85 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019

3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019

2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019

3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

Halaman 86 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)

Halaman 87 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019
Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020



- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020
Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar
Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei
2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei
2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-
V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20
Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal
09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-
VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal
30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-
VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal
22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal
06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-
VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020

Halaman 89 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020
Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-
IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020
Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian
Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak
ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

Halaman 90 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

Halaman 91 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/ CS/ XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

Halaman 92 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/ CSA/ III/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

Halaman 93 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04) - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK- III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019

Halaman 94 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019
- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA
 - a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019
 - b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019

Halaman 95 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



- c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar No.MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei 2019
- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI.TY.2019 Permohonan Dropping 25 Juni 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII.TY.2019 Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019
- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201 Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 September 2019
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No.MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropping 12 Desember 2019

Halaman 96 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019



- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT - 036/ SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-037/SIMAK - I/ TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT - 067/ SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT - 016/ SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT - 096/ SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT - 040/SIMAK - IX/ TY/2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT - 041/SIMAK-IX/ TY/2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/ TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT - 067/ SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/ TY/2021 Tanggal 26 April 2021
13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

Halaman 98 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.



- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening: 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening: 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening: 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening: 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.



- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.



23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
 24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
 25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
 26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
 27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
 28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.
- PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.
36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.

Halaman 102 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.

39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.

40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.

41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.

42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.

43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.

44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.

Halaman 103 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/ SIMAK/ TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.
48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.

Halaman 104 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan

Halaman 105 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.

68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW



warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam



- metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian



Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.

98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.

99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020

100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).

101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.

102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.

103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.



104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Pedi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.



Dirampas oleh negara Cq. PT. Surveyor Indonesia dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tri Yulianto.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening: 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.
113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.
114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.
115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.
117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening : 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

Halaman 112 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID.TPK/2024/PT MKS



(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ifachrul Madin.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Titus Tandil, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Karyadi, S.H., M.H., dan Mochamad Ilyas, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Eko Karyadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

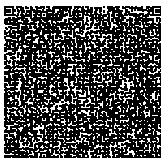
t.t.d.

Titus Tandil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196605171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 113 dari 113 Halaman Putusan Nomor 49/PID. PK/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 384 3348 (021) 3810350 (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)